

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU-BUKU**

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* Cet.1, Chandra Pratama, Jakarta.
- , 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Bagir Manan, 1999, *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2009, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Ull Press, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2018, *Desain Kebijakan Penegakan hukum Berbasis Keadilan Transformatif Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Efektif dan Efisien*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1986, *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Gramedia, Bandung.
- , 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta.
- Binziad Khadafi, 2023, *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

- Bismar Siregar, 1996, *Rasa Keadilan*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Deluxe Eight Edition* (Dallas: Thompson West, 1999).
- Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prehallindo, Jakarta.
- Dellyana Shanti, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, 2020, *Konsep Keadilan Pancasila*, Unmuh Ponorogo Press, Ponorogo.
- Hadari Djenawi Tahir, 1982, *Bab tentang Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminals Sanctions*, Stanford University Press, California.
- Imam Syaukani dan Ahsin Tohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum Cet 1*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cet. 2, Bayumedia Publishing, Malang.
- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, (terjemahan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kahar Masyhur, 1986, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mispansyah, 2020, *Tekhnik Pemilahan dan Pemilihan Teori Hukum dalam Tesis dan Disertasi*, Samudra Biru, Yogyakarta.
- Moh Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- , 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Muladi, 1998, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.
- , 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Karjadi dan R.Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politea, Bogor.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Cet. 8*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Parman Soeparman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP: Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rocky Marbun, 2019, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, ed.1, cet. 1, Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Soedirjo, 2014, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*, Cet I, Jakarta, CV Akademika Pressindo.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo dan Purnadi Purbacaraka, 1994, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, 2010, *Filsafat Hukum; Dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran*, Pusaka Refleksi, Makassar.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang.
- Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Van Bemmelen, *Lerboek van Het Nederland Strafprocesrecht*, Herziene Druk.
- William N. Dunn diterjemahkan oleh Muhadjir Darwin, 2000, *Analisis Kebijakan Publik*, PT Hadindita Graha, Yogyakarta.
- Willy D.S. Voll. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- WJS Purwodarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wolfgang Friedmann, 1990, *Teori & Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Rajawali Press. Jakarta.

Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

### **DISERTASI**

Abraham Samad, 2010, Hakikat Keadilan dalam Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Negeri), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Deassy Jacomina A Hehanussa, 2013, *Kebijakan Formulasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi pada pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.

### **JURNAL DAN MAKALAH**

Adi Harsanto, Jubair, Sulbadana, 2017, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 3.

Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Varia Peradilan, Nomor 304, Maret 2011.

Ajie Ramdan, 2017, *Kewenangan Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, JIKH Volume. 11 No. 2.

Budi Suhariyanto, 2015, *Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/Pid/2009.Vo.8/No.507*, Jurnal Komisi Yudisial.

Ferry Irawan Febriansyah, 2017, *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, DIH Jurnal Ilmu Hukum STAI Muhammadiyah, Tulungagung.

Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah dan Isis Ikhawansyah, 2017, *Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jurnal Mimbar Hukum UGM Vol 29 Nomor 2, Yogyakarta.

Mahkamah Konstitusi, *"Meniti Keadilan dalam Pengajuan PK Lebih dari Satu Kali"*, Jurnal Konstitusi No. 86 April 2014

M. Lutfi, *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.

Shanti Dwi Kartika, 2014, *Peninjauan Kembali lebih dari Satu Kali, antara Keadilan dan Kepastian Hukum*, Info Singkat Hukum Pusat Kajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI No. 06/II/P3DI/Maret.

Silviana dan Sonia Yanarika Widyahayu, 2016, *Analisis terhadap Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan Dasar Adanya Suatu Kekhilafan atau Suatu Kekeliruan yang Nyata dalam Perkara Penipuan*, Jurnal Verstek UNS Vol 4 No 2, Surakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014.

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 64/PUU-VIII/2010 tanggal 28 Pebruari 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 20/PUU-XXI/2023 tanggal 14 April 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 63/PUU-XXII/2024 tanggal 26 September 2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 102PK/Pid/2010 atas nama Yuswardi Kurnadi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 148 PK/PID.SUS/2010 atas nama Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 109PK/Pid/2017 atas nama Ekka Pontoh.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 PK/PID.SUS/2018 atas nama Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 67PK/Pid/2018 atas nama Hendra Kurniawan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 PK/PID.SUS/2019 atas nama Patrialis Akbar.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 226PK/Pid/2019 atas nama Tutuk Budi Supriyatmoko.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 147PK/Pid.Sus/2020 atas nama Adri Prastowo.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 646PK/Pid.Sus/2022 atas nama Galung Alias Kalung Bin Burniat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 207PK/Pid.Sus/2023 atas nama Jon Paiser.

### **BAHAN HUKUM LAINNYA**

Laporan Tahun 2021 Mahkamah Agung.

Laporan Tahun 2022 Mahkamah Agung.

Laporan Tahun 2023 Mahkamah Agung.

Pemberitaan dengan judul Jaksa Minta Kewenangan Konstitusional Ajukan PK, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21306> diunduh pada tanggal 15 Agustus 2024 jam 15.05 WIB.